



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 25 Desember 1992, umur 26 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 06 Agustus 1987, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan pada tanggal 20 Dzulhijah 1435 H di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi

Halaman 1 dari 13. Put. No.180/Pdt.G/2018/PA Clg



Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di
kediaman bersama di Link Cipinang Hilir RT. 004 RW. 004 Kelurahan
Gerogol, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, Perempuan, 17
September 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak bulan Agustus 2016,
rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut:

4.1 Tergugat merasa tidak dilayani dengan baik oleh Penggugat,
padahal Penggugat sangat melayani dan menghargai Tergugat

4.2 Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat ketika setelah
pulang kerja dalam keadaan cape

4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
seperti mencekik leher Penggugat

4.4 Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi
yang baik dalam mengurus anak, karena Penggugat dan Tergugat
sama-sama bekerja

4.5 Keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, bukannya menengahi Penggugat dan
Tergugat malah menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan November 2017, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 5 April 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat. Menurut cerita Penggugat ketika bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pengertian dimana Tergugat minta dilayani dan diperhatikan Penggugat namun tidak mengerti kondisi Penggugat yang baru pulang kerja, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang;



- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Link. Wilulang kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurut cerita Penggugat ketika bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pengertian dimana Tergugat minta dilayani dan diperhatikan Penggugat namun tidak mengerti kondisi Penggugat yang baru pulang kerja, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13. Put. No.180/Pdt.G/2018/PA Cig



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 5 April 2018 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016 disebabkan karena Tergugat merasa tidak dilayani dengan baik oleh Penggugat, padahal Penggugat sangat melayani dan menghargai Tergugat, Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat ketika

Halaman 7 dari 13. Put. No.180/Pdt.G/2018/PA Clg



setelah pulang kerja dalam keadaan capek, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti mencekik leher Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dalam mengurus anak, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bukannya menengahi Penggugat dan Tergugat malah menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk bercerai. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknyanya sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pengertian dimana Tergugat minta dilayani dan diperhatikan Penggugat namun tidak mengerti kondisi Penggugat yang baru pulang kerja, keluarga



Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan November 2017 yang lalu hingga sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menyetujui ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada



lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak pengertian dimana Tergugat minta dilayani dan diperhatikan Penggugat namun tidak mengerti kondisi Penggugat yang baru pulang kerja, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan November 2017 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه



Artinya : *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba’in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah

Halaman 12 dari 13. Put. No.180/Pdt.G/2018/PA Cig



membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI., MA
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 13 dari 13. Put. No.180/Pdt.G/2018/PA Clg



Hidayah, S.HI

Panitera Pengganti

Alvi Syafiatin, S.Ag

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)